

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) lingkup Pusat Kerja Sama Luar Negeri disusun sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Pusat Kerja Sama Luar Negeri sebagai penjabaran visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditentukan.

Dalam melaksanakan mandat yang telah dibebankan oleh penyelenggara pemerintah, Pusat Kerja Sama Luar Negeri adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Kerja Sama tersebut pada hakekatnya adalah hubungan kerja sama timbal balik yang saling menguntungkan dan mendukung kepentingan pembangunan pertanian nasional.

BAB II

RENCANA STRATEGIK DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. RENCANA STRATEGIK

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Pusat Kerja Sama Luar Negeri telah menyusun Rencana Strategik yang meliputi Visi, Misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program yang ditempuh untuk pencapaian tujuan dan sasaran, yang selanjutnya karena adanya penataan organisasi lingkup Kementerian Pertanian maka Rencana Strategik Pusat Kerja Sama Luar Negeri tahun 2010 – 2014 mengalami perubahan sebagai berikut :

1. Visi

Dalam rangka meningkatkan kerja sama di bidang pertanian di dalam forum bilateral, regional, dan multilateral, maka Pusat Kerja Sama Luar Negeri merumuskan **Visi** yakni menjadi institusi terdepan dalam melaksanakan kerjasama luar negeri bidang pertanian yang sehat, berintegritas dan dinamis.

2. Misi

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi Pusat Kerja Sama Luar Negeri dirumuskan sebagai berikut :

1. Terciptanya mutu pelayanan kerja sama luar negeri bidang pertanian yang efisien dan efektif
2. Tersusunnya rumusan kebijakan kerja sama luar negeri yang mendukung *Grand Strategy* pembangunan pertanian nasional
3. Tersusunnya program dan perencanaan kerja sama luar negeri bidang pertanian melalui forum kerja sama bilateral, regional dan multilateral
4. Terwujudnya peran sebagai leading diplomasi dan negosiasi bidang pertanian di forum Internasional
5. Terdiseminasikannya hasil kesepakatan kerja sama luar negeri bidang pertanian yang berkesinambungan

6. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi hasil kesepakatan kerja sama luar negeri bidang pertanian
7. Terlaksananya fungsi pelayanan organisasi yang prima,

3. Tujuan

Dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misi Pusat Kerja Sama Luar Negeri, maka tujuan yang ingin dicapai adalah: meningkatkan kerja sama teknis dan ekonomi Indonesia melalui kerangka Kerja sama Bilateral, Regional dan Multilateral.

4. Sasaran

Guna mencapai tujuan yang diinginkan maka Pusat Kerja Sama Luar Negeri menyusun sasaran organisasi dimana masing-masing sasaran dimaksud terdapat indikator kinerja yang ingin dihasilkan selama periode tahun 2010 - 2014, dimana sasaran yang ingin dicapai adalah

terjalinnnya kerja sama dengan pihak luar negeri, baik negara maupun lembaga internasional yang saling menguntungkan dan berkelanjutan dalam bidang pertanian.

5. Program Kerja

Program kerja Pusat Kerjasama Luar Negeri yang telah ditetapkan di dalam dokumen Renstra yang akan dimuat dalam Formulir Rencana Strategik (RS) pada Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah:

- a. Koordinasi Pengembangan Kerja sama Bilateral bidang pertanian;
- b. Koordinasi pengembangan kerja sama Regional bidang pertanian;
- c. Koordinasi pengembangan kerja sama Multilateral bidang pertanian; dan
- d. Koordinasi Tata Usaha Pusat Kerja sama Luar Negeri dan Pembinaan Atase Pertanian.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Pusat Kerjasama Luar Negeri tahun 2013 meliputi Satu Program yaitu: **Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian**

I. Kegiatan Tahun 2013 yaitu :

No.	Kegiatan	Target	Satuan
1.	Nota kesepakatan kerjasama pertanian dalam kerangka bilateral, regional dan multilateral, serta PBB untuk pangan dan pertanian	13	Laporan
2.	Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran	1	Dokumen
3.	Laporan Kegiatan dan Pembinaan	3	Laporan
4.	Layanan Perkantoran	12	Bulanan
5.	Kendaraan Bermotor	5	Unit
6.	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	78	Unit

II. Indikator Keberhasilan

Adapun yang menjadi indikator keberhasilan dari kegiatan yang ada di Pusat Kerja Sama Luar Negeri adalah terdiri dari beberapa hal yakni :

1. Dokumen pembinaan dan penyelenggaraan kerja sama internasional dalam kerangka bilateral, regional dan multilateral;
2. Dokumen Prioritas Kerja sama luar negeri bidang pertanian
3. Jumlah Nota Kesepakatan kerja sama pertanian dalam kerangka bilateral, regional dan multilateral;
4. Laporan pengembangan kerja sama luar negeri; dan
5. Laporan urusan tata usaha Pusat Kerja sama Luar Negeri dan Atase Pertanian

III. **Penetapan Kinerja Tahun 2013**

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Pusat Kerja sama Luar Negeri telah menetapkan kinerja yang akan dicapai pada tahun 2013 sesuai dengan Organisasi dan Tata Kerja yang baru sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 dan Peraturan Menteri Pertanian nomor 30/Permentan/OT.140/5/2011 tentang rincian tugas pekerjaan unit kerja eselon IV lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, dan penetapan kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

– **Sasaran Strategis**

Meningkatnya kerja sama luar negeri di bidang pertanian melalui forum bilateral, regional dan multilatera

– **Indikator Kinerja**

- Realisasi Kegiatan Kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti dengan target 80%
- Jumlah dokumen nota kesepakatan kerja sama pertanian dalam kerangka bilateral, regional dan multilateral sebesar 13 dokumen
- Jumlah laporan kegiatan dan pembinaan sebanyak 3 laporan
- Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran sebesar 1 dokumen
- Jumlah dokumen pembinaan/penyelenggaraan kerja sama di atase pertanian Tokyo, Washington, Brussel dan Roma sebesar 4 dokumen
- Jumlah layanan perkantoran sebanyak 12 Bulan layanan

Guna mendukung capaian kinerja tersebut diatas Pusat Kerja Sama Luar Negeri didukung dengan anggaran dari DIPA TA 2013 sebesar Rp.31.421.290.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

Untuk mengetahui Akuntabilitas Kinerja Pusat Kerja Sama Luar Negeri akan dijelaskan indikator kinerja yang digunakan, tingkat pencapaian dan analisis kinerja termasuk didalam permasalahan yang dihadapi dan strategi yang digunakan untukantisipasi masalah yang dihadapi dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator.

Tabel Hasil Akuntabilitas Kinerja

No.	Kegiatan	Target	Realisasi	PAGU	Realisasi Belanja	Persentase	Uraian Hasil
1.	Nota kesepakatan Kerja Sama Pertanian dalam Kerangka Bilateral, Regional dan multilateral	13 Dok	13 Dok	22.166.727.000	17.024.343.720	76.80	<ul style="list-style-type: none"> • BeBerapa MoU telah ditandatangani • Adanya sosialisasi di Pusat dan daerah terkait Kerja Sama Luar Negeri • Penyelenggaraan Sidang – Sidang Internasional
2.	Layanan Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	6.134.377.000	4.647.547.129	75.77	<ul style="list-style-type: none"> • Terbayarnya Gaji dan Tunjangan pegawai
3.	Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran	1 Dok	1 Dok	324.676.000	300.632.600	92.59	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran dalam mendukung kegiatan Pusat Kerja Sama Luar Negeri
4.	Laporan Kegiatan dan Pembinaan	3 Lap	3 Lap	1.838.310.000	1.522.126.521,00	82.80	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya Dokumen Pembinaan Kegiatan Pusat Kerja Sama Luar Negeri
5.	Kendaraan Bermotor	5 Unit	5 Unit	100.000.000	96.416.500	96.42	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya kendaraan dinas pegawai/pejabat
6.	Perangkat Pengolah data dan Komunikasi	78 Unit	78 unit	207.500.000	207.497.000	92.59	<ul style="list-style-type: none"> • Terfasilitasinya aktivitas operasional kegiatan perkantoran
Total				31.421.290.000	24.269.327,183	77,24%	

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi capaian indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut :

No.	Kegiatan	2012	2013
1.	Sosialisasi/Seminar/Workshop Kesepakatan Kerjasama Bilateral,Regional Dan Multilateral	3 Seminar	5 Seminar
2.	Sidang/Pertemuan yang dilaksanakan baik sebagai Tuan Rumah maupun menghadiri kegiatan tersebut	21 Sidang/Pertemuan	24 Sidang/Pertemuan
3.	Kunjungan Menteri/Wakil Menteri	13 Negara	6 Negara
4.	Kajian Akademis	3 Kajian	1 Kajian
5.	MoU/Workplan	3 MoU	4 MoU 2 Agreement 1 Protocol
6.	Bantuan Peralatan Pertanian		9 Negara

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan Pusat Kerjasama Luar Negeri pada umumnya cukup berhasil dalam mencapai sasaran dengan baik. Untuk membiayai operasional Pusat Kerjasama Luar Negeri pada tahun 2013 mendapat anggaran sebesar Rp.31.421.290.000,-. Anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 24.269.327.183., atau sebesar 77,24%.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan Pusat KLN pada Tahun 2013 dengan rincian kegiatan sebagai berikut: (1) Seminar Peraturan PHLN dan Sosialisasi Pemanfaatan BLN; (2) Sosialisasi Hasil – Hasil Kerja Sama Ekonomi Sub Regional IMT- GT; (3) Workshop Potensi dan Peluang Kerjasama Bilateral dengan Negara – Negara non tradisional untuk bidang pertanian;(4) Seminar Optimalisasi Bantuan Pemerintah Jepang;(5) Sosialisasi Hasil Pertemuan Strategic Planning Meeting 2013 BIMP-EAGA; (6) Pertemuan The 1st BIMP-EAGA Agribusiness Cluster;(7) Pertemuan SOM

Ke-22 dan Ministerial Meeting ke-17 BIMP-EAGA; (8) Pertemuan IMT-GT Focus Group 8) Pertemuan IMT-GT *Focus Group Meeting*; (9) Pertemuan IMT-GT *Working Group On Agriculture, Agro Based Industry and Environment (WGAAE)* ke-6; (10) IMT-FT *National Secretariat Meeting* ke-3, CIMT *Advisory Committee Meeting* ke-6, dan Senior Official Preparatory Meeting for IMT-GT Summit ke-7; (11) Pertemuan nasional dalam rangk Sosialisasi Hasil Kerja Sama Ekonomi Sub Regional UNESCAP ke-69; (14) Pertemuan *The 9th GC CAPSA*; (15) Pertemuan *The 1st Meeting on D-8 Ad Hoc Group on Fertilizer*; (16) *The 2nd Supervisory Committee Meeting of the D-8 PTA*; (17) Pertemuan Tingkat Menteri D-8 ke-4 Bidang Pertanian dan Kesehatan Pangan; (18) Pertemuan *SOM APEC on Food Security (PPFS. ATCWG, HLPDAB)*; (19) Pertemuan ke-6 JAWG Indonesia-Thailand; (20) *the 2nd Indonesia-New Zealand Working Group on Agriculture Cooperation*, (21) *The 8th JCM Indonesia-Thailand*; (22) *The 13th Meeting of the Joint Commission for Bilateral Cooperation*; (23) *Diplomatic Tour* Pembangunan Pertanian; (24) *The 2nd Joint Working Group Meeting On Agriculture Indonesia-India*; (25) sidang EB IFAD ke-146 di Roma; (26) Sidang EB IFAD ke-148 di Roma; (27) Sidang ITPGRFA ke-5 di Oman; (28) Hari Pangan Sedunia ke-33 Tahun 2013; (29) Kunjungan Menteri Pertanian (sudan, Tunisia, Arab Saudi, Malaysia dan New Zealand; (30) Kunjungan Wakil Menteri Pertanian (Australia dan Taiwan); (31) Kajian Evaluasi Pengembangan Inovasi Teknologi di Lokasi Program Berbantuan Luar Negeri; (32) Penandatanganan 4 MoU (Indonesia-Argentina, Indonesia-Belarus, Indonesia-Polandia, dan Indonesia-Peru; (33) Penandatanganan *Agreement On Agricultural Technical Cooperation IETI-TETO*; (34) *Mutual Recognition Agreement (MRA) on the application Of Plant Quarantine and Phytosanitary Measures Indonesia-Pakistan*; (35) *Protocol Of Inspection and Quarantine Requirement for the Export Of Salacca Fruit From Indonesia to China* antara Indonesia dan China; serta (36) Natuan Peralatan Pertanian (Vanuatu, Fiji, Gambia, Tanzania, Senegal, Kenya, Zimbabwe, Ethiopia, Mozambic).

BAB IV

ANALISIS KINERJA

A. AKUNTABILITAS KINERJA KEGIATAN

Pembinaan kerjasama luar negeri merupakan fungsi yang strategis dalam rangka meningkatkan dan membangun kerjasama di bidang pertanian dalam kerangka bilateral, regional dan Multilateral yang tidak terpisahkan dari kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif.

Bidang Kerjasama Luar Negeri pada tahun 2013 telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk menunjang program pembangunan pertanian dengan keberhasilan terjalannya kerjasama luar negeri saling menguntungkan dan berkelanjutan dalam bidang teknis dan ekonomi pertanian. Sasaran Indikator bidang kerjasama luar negeri adalah realisasi kegiatan kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti dengan target 80%. Ruang lingkup capaian realisasi kegiatan kerja sama luar negeri yang ditindaklanjuti meliputi:

1. Sosialisasi/Seminar/Workshop kesepakatan kerjasama Bilateral,Regional dan Multilateral
2. Pelaksanaan Sidang/Pertemuan
3. Kunjungan Menteri/Wakil Menteri dan eselon I
4. Kajian Akademis
5. MoU/Workplan;serta
6. Bantuan Peralatan Pertanian;

Capaian indikator kinerja realisasi kegiatan kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti pada tahun 2013 memiliki target 52 kegiatan, dan seluruh target tersebut dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti seluruhnya (100%) atau secara persentase capaian ukuran keberhasilan sebesar 125% (sangat berhasil). Hasil pada tahun 2013 ini mampu melebihi capaian pada tahun 2012, dimana pada tahun 2012 pencapaian realisasi kegiatan kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti sebanyak 43 kegiatan atau meningkat sebanyak 9

kegiatan (20,93%). Analisis akuntabilitas kinerja berkaitan dengan pencapaian kinerja kegiatan melalui program kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagai mana ditetapkan dalam rencana strategik. Serta perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan, dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam hal akuntabilitas keuangan, di Tahun 2013 terlihat bahwa struktur anggaran yang lebih besar dibanding Tahun lalu, dimana hanya sebesar Rp. 24.357.234.000 menjadi Rp.31.421.290.000 dan diikuti dengan realisasi yang meningkat pula menjadi 77,24%, hal ini menunjukkan keseriusan Pusat Kerjasama Luar Negeri dalam melaksanakan kegiatan secara optimal, efisien dan efektif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembinaan kerjasama luar negeri merupakan fungsi yang strategis dalam rangka meningkatkan dan membangun kerjasama dibidang Pertanian dalam kerangka bilateral, regional, multilateral dan Badan PBB untuk pangan pertanian yang tidak terpisahkan dari kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Pusat Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pertanian pada tahun 2013 telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis dalam menunjang program pembangunan pertanian dengan keberhasilan terjalannya kerjasama luar negeri saling menguntungkan dan berkelanjutan dalam bidang teknis dan ekonomi pertanian.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja Pusat Kerjasama Luar Negeri tahun 2013 sangat **efisien dan efektif**, Walaupun serapan anggaran yang dihasilkan belum sepenuhnya mencapai target dikarenakan Pengembangan kerjasama luar negeri bidang pertanian sangat terkait dengan berbagai instansi baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga dalam penyelesaian dokumen – dokumen kerjasama memerlukan proses dan negosiasi yang jadwalnya sering terkendala karena tergantung pada kesiapan negara mitra, sehingga sering terjadi kegiatan tersebut batal dilaksanakan dan diharapkan untuk masa yang akan datang kondisi ini dapat segera diantisipasi dalam melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang lebih baik.

B. Saran dan Tindak Lanjut

Pada masa yang akan datang diharapkan fungsi maupun peranan dari pusat kerjasama luar negeri dapat ditingkatkan lebih baik agar pengembangan kerjasama luar negeri dan percepatan program pembangunan pertanian dapat berjalan dengan baik.

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

LAMPIRAN I. Rencana Strategis (RS)

LAMPIRAN II. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

LAMPIRAN IV. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)

LAMPIRAN V. Data Kepegawaian Biro Kerjasama Luar Negeri tahun 2010

LAMPIRAN VI. Data Keuangan Biro Kerjasama Luar Negeri, Tahun 2010

LAMPIRAN VII. Struktur Organisasi Biro Kerjasama Luar Negeri